



Mantapkan Pelayanan Publik

Pontianak-Kubu Raya Perkuat Kerja Sama

KUBU RAYA, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) bersama Pemerintah Kota Pontianak, Kalbar melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan pelayanan publik di Ruang Praja Utama, Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu.

Pada kesempatan itu Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kerja sama ini sebenarnya telah ada sejak pemerintahan sebelumnya, yakni ketika Sutarmidji menjadi Wali Kota Pontianak dan Rusman Ali menjadi Bupati Kubu Raya. Kemudian untuk kerja sama kali ini diperbaharui dan lebih konkret dari kerja sama sebelumnya.

"Antara Kubu Raya dengan

Banyak juga warga Pontianak yang kerja di Kubu Raya atau sebaliknya.



Edi R Kamtono
Wali Kota Pontianak

Pontianak hanya dibatasi administrasi pemerintahan, namun jika dilihat dari posisi tempat tinggal dan aktivitas serta mobilitas penduduk, pada dasarnya sama karena

banyak juga warga Pontianak yang kerja di Kubu Raya atau sebaliknya," jelasnya.

Edi menerangkan, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan me-



Muda Mahendra
Bupati Kubu Raya

Ke depan langkahnya lebih konkret, bukan hanya wacana dan formalitas.

mudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

"Kerja sama ini, nantinya akan dituangkan kema-

■ Bersambung ke hal. 11



Mantapkan Pelayanan Publik

Sambungan Hal.9

li di dalam perjanjian kerja sama antar-teknis, misalnya PDAM Kota Pontianak dengan PDAM Kubu Raya, Dinas LH, Perhubungan, dan lainnya," tambahnya.

Menurutnya, kerja sama yang dijalin sangat strategis dan positif. Karena adanya kolaborasi untuk membangun di semua bidang.

Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menjelaskan selain adanya pembaharuan atau penyegaran kerja sama antara Pemkab Kubu Raya dan Pemkot Pontianak, kerja sama menjadi dasar yang nantinya pada setiap SKPD teknis yang menjalankan program untuk berkomunikasi antara SKPD Kubu Raya dengan SKPD Pontianak.

"Ke depan langkahnya lebih konkret, bukan hanya wacana dan formalitas, terutama pelayanan yang sifatnya mendesak. Seperti pelayanan air bersih di wilayah perbatasan antara Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya," kata dia.

Ia menyebutkan antara Kota Pontianak dengan Kabupa-

ten Kubu Raya saling bergantung dan membutuhkan. Ia meyakini Pemkot Pontianak mempunyai visi dan langkah untuk memaksimalkan pelayanan dan percepatan dengan banyaknya inovasi-inovasi.

"Memang diperlukan sinergisitas dan kerja sama yang solutif untuk mengurangi masalah dan resiko yang ada di masyarakat," ujarnya.

Menurut Muda, jika antara Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya sudah satu pemikiran, maka akan saling membutuhkan.

Hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemkab Kubu Raya dan Pemkot Pontianak.

Lima Kali WTP

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Predikat WTP kelima kali berturut-turut ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono kepada Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Selasa 28 Mei 2019.

Saat penyerahan LHP, Bupati Muda mengatakan bahwa capaian opini WTP kali kelima tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diraih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

"Ini merupakan suatu kewajiban karena WTP itu wajib. Kalau sampai disclaimer, itu berarti ada masalah. Harapan kami untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar itu seperti apa. APBD ini uang masyarakat jadi harus transparan dan akuntabel," ujarnya.

Orang nomor satu di Kubu Raya ini juga mengatakan, keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama lima tahun

berturut-turut, menunjukkan kian membaiknya komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

Ia menyebut, raihan WTP untuk kelima kalinya merupakan buah dari kerja sama sinergis antar jajaran pemerintah daerah dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya. "Alhamdulillah kita mendapat Opini WTP yang kelima kalinya. Mudah-mudahan pencapaian ini dapat terus dijaga dan dipertahankan," harapnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono menuturkan bahwa ada 11 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat Opini WTP di antaranya Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. (gam/oni)